

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Kasihan

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana strategi Kapanewon Kasihan Tahun 2021 - 2026 (selanjutnya disebut Renstra) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki, maka disusunlah Renstra Kapanewon Kasihan sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Renstra Kapanewon Kasihan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan;

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Kasihan adalah sebuah kapanewon (kecamatan) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Wilayah Kapanewon Kasihan dahulu merupakan wilayah Kawedanan Godean. Nama Kasihan diambil dari nama Sendang Pengasihan, sebuah telaga yang terletak di dusun Kasihan, Kelurahan Tamantirto. Wilayah Kasihan secara turun temurun diduduki oleh Kerabat yang lebih muda Raja Yogyakarta, tercatat dari tahun 1760, penguasa Kadipaten Kasihan adalah :

1. Pangeran Yudonegoro
2. Pangeran Suronegoro
3. Pangeran Brotodiningrat I
4. Pangeran Surosentiko
5. Pangeran Brotodiningrat II
6. Pangeran Brotodiningrat III
7. Pangeran Fransiscus Xaverius Buntaran Martoatmodjo (1936-1952)

Pada bulan Desember 1945, wilayah ini diserahkan resmi kepada Pemerintahan desa dibawah pimpinan Bapak Raden Ngabehi Prodjosantoso, selanjutnya menjadi Camat Kasihan.

Perkembangan Undang-Undang dalam pengaturan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25).

Pada awalnya Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul. Kemudian berdasarkan regulasi terbaru Kapanewon Kasihan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Kapanewon Kasihan disusun atas dasar :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 - h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 - i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.

- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

Dokumen Renstra Kapanewon Kasihan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KAPANEWON KASIHAN

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

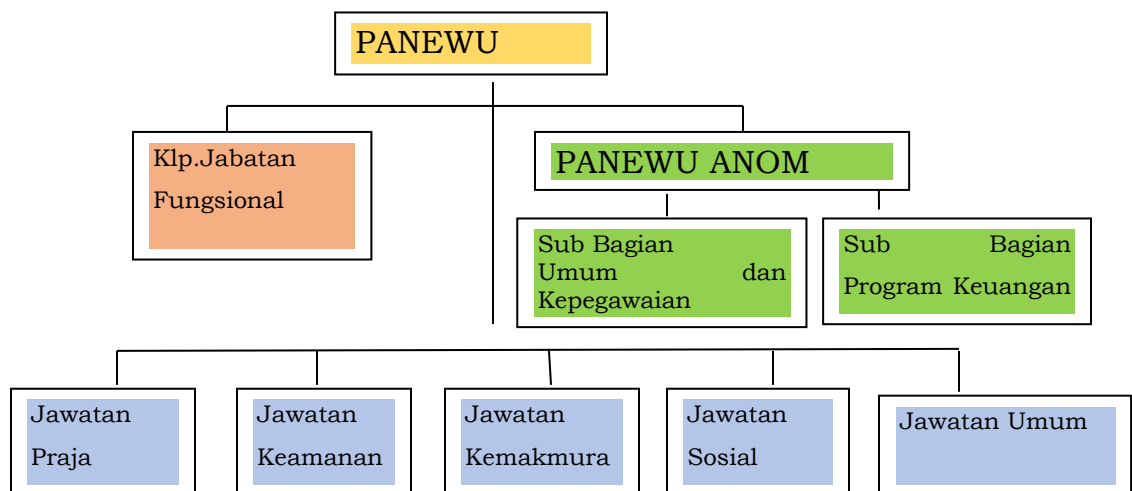
Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Kapanewon mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- b. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Kasihan



Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123), maka susunan organisasi Kapanewon Kasihan terdiri dari :

- a. Seorang Panewu;
- b. Seorang Panewu Anom;
- c. Seorang Kepala Sub Bagian Umum;
- d. Seorang Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
- e. Seorang Kepala Jawatan Praja;
- f. Seorang Kepala Jawatan Sosial;

- g. Seorang Kepala Jawatan Kemakmuran
- h. Seorang Kepala Jawatan Keamanan;
- i. Seorang Kepala Jawatan Umum; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Panewu Anom sesuai dengan struktur organisasi Kapanewon Kasihan membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mendukung kinerja sekretariat.

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. pengelolaan barang milik daerah;
- h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jawatan Praja

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 - 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.
- c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - e. pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - f. pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;

4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
6. fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN KEAMANAN

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. h.pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN KEMAKMURAN

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- b. h.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- a. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- b. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN SOSIAL

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN UMUM

Jawatan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Umum;
- b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;

- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum; m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JABATAN FUNGSIONAL

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 SDM/Aparatur

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 139) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123); maka kondisi personil Kapanewon Kasihan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Formasi Jabatan dan Keterisian Jabatan

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Panewu	1	1	
2.	Panewu Anom	1	1	
3.	Kasubag Program dan Keuangan	1	0	kosong
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	0	kosong
5.	Kepala Jawatan Praja	1	0	kosong
6.	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	
7.	Kepala Jawatan Sosial	1	1	
8.	Kepala Jawatan Keamanan	1	1	
9.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	0	kosong
10.	Analisis Pelayanan	1	1	
11.	Analisis Keamanan	1	1	
12.	Analisis Program Pembangunan	1	1	
13.	Analisis Program Keuangan	1	1	TB
14.	Pengadministrasian Kepegawaian	1	1	
15.	Pengadministrasian Umum pada Jawatan Praja	1	1	
16.	Pengadministrasian Umum pada Jawatan Sosial	1	1	
17.	Bendahara	1	1	
18.	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	1	1	
19.	Pramu Bakti	1	1	

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	Calon Analis Program Pembangunan	1	1	
21.	Calon Pelaksana/Terampil - Arsiparis	1	1	
22.	Calon Pengadministrasi Keuangan	1	1	
(data per Tanggal 27 Januari 2021; sumber dari Subbag Umum dan Kepegawaian)				

Tabel 2.2.2.
Data Sumber Daya Manusia Kapanewon Kasihan

NO	URAIAN	KETERANGAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	11 orang
		Perempuan	7 orang
2.	Golongan Ruang	Pembina Tk.I, IV/b	1 orang
		Pembina, IV/a	1 orang
		Penata Tk.I, III/d	6 orang
		Penata, III/c	1 orang
		Penata Muda Tk.I, III/b	1 orang
		Penata Muda, III/a	2 orang
		Pengatur, II/c	3 orang
		Pengatur Muda Tk.I, II/b	1 orang
		Juru Tk.I, I/d	1 orang
3.	Tingkat Pendidikan	SMP	1 orang
		SMA	5 orang
		D.III	3 orang
		D.IV	1 orang
		S 1	7 orang
		S 2	1 orang
4.	Kelompok Umur	< 30 tahun	4 orang
		30 s.d. 40 tahun	1 orang
		41 s.d. 50 tahun	5 orang
		51 s.d. 60 tahun	8 orang
5.	Status Kepegawaian	PNS	15 orang
		CPNS	3 orang
		Kontrak	5 Orang
6.	Diklat Penjenjangan	PIM III/SPAMA	1 orang
		PIM IV/ADUMLA	4 orang
(data pertanggal 27 Januari 2021; Sumber Data dari Subbag Umum dan Kepegawaian)			

Berdasarkan kondisi personil dan jabatan di Kapanewon Kasihan, diketahui ada 4 Jabatan yang kosong yaitu :

- a. Kepala Jawatan Praja;
- b. Kepala Jawatan Pelayanan Umum;
- c. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;
- d. Kepala Sub Bagian Umum

Jabatan Analis, Pengadministrasi, Pramু Bhakti, Arsiparis dan Bendahara sudah terpenuhi.

Sumber daya manusia (ASN-CPNS-Tenaga Kontrak) dari segi jenis kelamin, golongan ruang, status kepegawaian dan tingkat pendidikan sudah seimbang dan merata. Sedangkan dari segi kelompok umur mayoritas diatas 40 tahun, untuk umur dibawah 30 tahun mayoritas CPNS yang baru masuk tahun 2020. Perlu peremajaan pegawai yang ada di Kapanewon Kasihan sehingga mampu mendukung kinerja Kapanewon Kasihan yang lebih baik.

Selain dari unsur PNS dan CPNS, di Kapanewon Kasihan ada beberapa unsur yang membantu kinerja Kapanewon Kasihan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Data SDM Non PNS

NO	UNSUR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	UPK	3 orang
2.	Pendamping PKH	15 orang
3.	Pendamping Desa	3 orang
4.	TKSK	1 orang
5.	TKPK	1 orang
6.	PLKB	4 orang
7.	Tenaga Honorer	5 orang
8.	Operator Kependudukan	2 orang

UPK merupakan keberlanjutan program PNPM dan saat ini bergerak dalam bidang simpan pinjam perempuan. Untuk pendampingan program PKH, BPNT, BST dan program lainnya yang bergerak dalam bantuan sosial dibantu oleh para pendamping PKH, TKSK dan TKPK, sedangkan untuk pengembangan dan pemberdayaan kalurahan dibantu oleh pendamping kalurahan.

Ketugasan Tenaga Honorer di Kapanewon Kasihan yaitu jaga malam (1 orang), tenaga kebersihan (2 orang) dan tenaga pelayanan di jawatan pelayanan umum (2 orang). Sementara itu untuk operator kependudukan, di

Kapanewon Kasihan mendapat tambahan tenaga sebanyak 2 orang dalam hal operator sistem kependudukan.

2.2.2 Aset/Modal

Kapanewon Kasihan memiliki kekayaan/aset peralatan dan sarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.4. Aset Kapanewon Kasihan

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gedung	1 unit	baik
2	Kendaraan roda 4 (empat)	1 buah	baik
3	Kendaraan roda 2 (dua)	7 buah	6 dalam kondisi baik dan 1 rusak
4	Filing cabinet	23 buah	baik
5	Almari Besi	4 buah	baik
6	Almari Kayu	3 buah	baik
7	Almari Arsip	3 buah	baik
8	Rak kayu	2 buah	baik
9	Mesin ketik elektrik	1 Unit	baik
10	Mesin ketik manual	4 buah	baik
11	Komputer	10 unit	Baik
12	Printer	16 buah	Baik
13	Kursi kerja	73 buah	Baik
14	Kursi rapat	70 buah	Baik
15	Kursi tamu	2 buah	Baik
16	Meja kerja	51 set	Baik
17	Pesawat telepon	1 buah	Baik
18	Pesawat TV	2 Unit	baik
19	Papan Monografi	1 Unit	baik
20	Meja kecil / telepon	2 Unit	Baik
21	Meja pelayanan	1 Unit	Baik
22	Meja Komputer	4 Unit	Baik
23	Kursi tunggu	1 Unit	Baik
24	Wirelest Amplifeyer	1 Unit	Baik
25	Amplifier	1 Unit	Baik
26	Rak besi	2 Unit	baik
27	Mic genggam	3 biji	Baik
28	Tiang Mic	3 Unit	baik

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)
29	Meja rapat	19 Unit	Baik
30	Meja panjang pelayanan	1 Unit	Baik
31	Papan Pengumuman	1 Unit	Baik
32	Meja ½ biro	4 unit	Baik

Sarana dan prasarana yang ada di Kapanewon Kasihan sudah tersedia akan tetapi masih perlu adanya penambahan untuk lebih mendukung kinerja PD Kapanewon Kasihan, terutama untuk penanganan pandemi covid19 seperti alat sterilisasi baik dalam ruangan maupun diluar ruangan dan untuk pengawasan lingkungan Kantor Kapanewon Kasihan perlu adanya tambahan alat CCTV karena wilayah Kapanewon Kasihan termasuk dalam Bagian Wilayah Perkotaan.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tema pokok yang dikedepankan pada bab ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Kapanewon yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) dalam rangka untuk melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan ke kapanewon. Kinerja Pelayanan Kapanewon Kasihan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat terrealisasi sesuai target, hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.7.

Kerjasama seluruh kapasitas yang ada di Lingkungan kerja Kapanewon Kasihan dan terjalinnya komunikasi yang baik antar stakeholder yang ada membuat kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Kepemimpinan Bapak Panewu dalam mengkoordinasikan antar kepala jawatan sebagai pelaksana kegiatan dan sekretariat yang bertugas kerumahtanggan dan yang bersifat ke-administrasian dapat terlaksana dengan baik. Kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan untuk daya dukung berjalannya pelayanan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Kapanewon Kasihan yang notabene merupakan wilayah yang berbatasan dengan wilayah Kota Yogyakarta dan sebagian wilayahnya berupa Pabrik, lembaga pendidikan, pertokoan ,perumahan dan dengan jumlah penduduk kurang lebih diangka 102.098 jiwa, sehingga sangat kompleks permasalahan yang ada. Jumlah masyarakat yang mengurus administrasi baik administrasi kependudukan maupun administrasi yang lain juga sangat banyak.

Tabel 2..3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
A.	Indikator Tujuan PD															
B.	Indikator Sasaran PD															
1	IKM Kecamatan	80	85	90	90	90	80	85	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	85	90	-	-	-	85	90	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDDes tepat waktu	-	-	95	100	100	-	-	95	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rata-rata persentase kesesuaian APBDDes dengan RPJMDes	80	85	88	90	90	80	85	88	90	90	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	85	90	100	100	80	85	90	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
2017-2020																
C	Indikator Program-Kegiatan-Sub Kegiatan															
1	Cakupan Pelayanan Masyarakat	95	95		96		100	100		96		105%	105%		100%	
	Nilai IKM			90					90					100%		
1.1	Rakor Peningkatan Pelayanan Masyarakat	4 kali					4 kali					100%				
1.2	jumlah rakor kegiatan pelayanan masyarakat		4 kali					4 kali					100%			
1.3	Jumlah orang lembur pelayanan di hari Sabtu		572 ok	52 kali				572 ok	52 kali				100%	100%		
1.4	Jumlah pegawai lembur			11 orang bulan					11 orang bulan					100%		
1.5	kelancaran pelayanan masyarakat			100 persen					100 persen					100%		
1.6	Masyarakat yang dilayani				27.0000 orang					27.0000 orang					100%	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1.7	Layanan yang diberikan				20 jenis					20 jenis					100%	
1.8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				96 angka					96 angka					100%	
2	Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	95	95	95	100		100	100	100	100		105%	105%	105%	100%	
2.1	Pembelian Seragam Paskibra	50 set					50 set					100%				
2.2	Rakor Fasilitasi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	4 kali					4 kali					100%				
2.3	Pelaksanaan Rakor Koordinasi Unsur Muspika	4 kali					4 kali					100%				
2.4	Pelaksanaan Gerak Jalan Unsur Muspika	1 kali					1 kali					100%				
2.5	Jumlah Peserta Rapat koordinasi		100 orang					100 orang					100%			
2.6	Jumlah peserta pelaksanaan Kegiatan fasilitasi		500 ok					500 ok					100%			
2.7	Jumlah rakor, pembinaan, dan fasilitasi		10 kali					10 kali					100%			
2.8	Jumlah peserta musrenbang dan rapat persiapan musrenbang		350 orang					350 orang					100%			
2.9	Jumlah rakor persiapan 2kali, pelaksanaan musrenbang 1kali dan evaluasi musrenbang 1 kali		4 kali					4 kali					100%			
2.10	Jumlah patroli/piket keamanan lingkungan		12 Bulan					12 Bulan					100%			
2.11	Jumlah Honor Petugas (2) Piket Malam		12 Bulan					12 Bulan					100%			
2.12	Jumlah pelaksanaan upacara 17 an dan hari hari besar		14 kali					14 kali					100%			
2.13	Jumlah Pakaian Paskibra 80 Set"		80 set					80 set					100%			
2.14	Jumlah peserta upacara		360 orang					360 orang					100%			
2.15	Jumlah rakor dan kegiatan		4 kali					4 kali					100%			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	pendampingan/fasilitasi															
2.16	Jumlah peserta Rapat/pendampingan		120 orang					120 orang					100%			
2.17	Jumlah monitoring PBB		2 kali					2 kali					100%			
2.18	kelancaran pembayaran PBB		100 persen					100 persen					100%			
2.19	jumlah piket keamanan			365 hari					365 hari					100%		
2.20	kelancaran kegiatan pengendalian keamanan lingkungan			100 persen					100 persen					100%		
2.21	terselenggaranya upacara hari - hari besar			100 persen					100 persen					100%		
2.22	jumlah seragam paskibra			80 buah					80 buah					100%		
2.23	Jumlah upacara hari besar dan 17 an			12 kali					12 kali					100%		
2.24	Jumlah kegiatan musrenbang tk kecamatan			1 kali					1 kali					100%		
2.25	kelancaran kegiatan musrenbang			100 persen					100 persen					100%		
2.26	Jumlah pendampingan administrasi Lomba desa			2 kali					2 kali					100%		
2.27	jumlah laporan monografi kecamatan			1 laporan					1 laporan					100%		
2.28	Jumlah pendampingan APBDes dan RAPBDes			2 kali					2 kali					100%		
2.29	Meningkatnya perencanaan pemerintahan umum			100 persen					100 persen					100%		
2.30	Laporan Rapat Koordinasi Muspika				4 laporan					4 laporan					100%	
2.31	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional				16 kali					16 kali					100%	
2.32	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan				100 persen					100 persen					100%	
2.33	Laporan monev penanggulangan bencana				2 laporan					2 laporan					100%	
2.34	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan				4 laporan					4 laporan					100%	
2.35	Pembinaan Linmas/ kelompok masyarakat				100 orang					100 orang					100%	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
2.36	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan				100 persen					100 persen					100%	
2.37	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				2 laporan					2 laporan					100%	
2.38	Pendampingan pengelolaan keuangan desa				2 kali					2 kali					100%	
2.39	Laporan pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes				4 laporan					4 laporan					100%	
2.40	Dokumen monografi kecamatan				2 dokumen					2 dokumen					100%	
3	Cakupan Musrenbang Kecamatan Yang Sesuai Dengan Program Prioritas Kabupaten	95	95	95	96		100	100	100	96		105%	105%	105%	100%	
3.1	Penyelenggaraan Musrenbang	1 kali					1 kali					100%				
3.2	Rakor Dan Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Ke 186 Dan HUT RI Ke 72	4 kali					4 kali					100%				
3.3	Jumlah rapat/rakor Kader PKK		4 kali					4 kali					100%			
3.4	Jumlah peserta rapat/rakor		180 0k					180 0k					100%			
3.5	Jumlah Kader PKK Kegiatan		120 orang					120 orang					100%			
3.6	jumlah rapat koordinasi TP PKK			3 kali					3 kali					100%		
3.7	Kelancaran pembinaan organisasi perempuan			100 persen					100 persen					100%		
3.8	Dokumen Musrenbang Kecamatan				1 dokumen					1 dokumen					100%	
3.9	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan				96 persen					96 persen					100%	
4	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	95	95	95	96		100	100	100	100		105%	105%	105%	100%	
4.1	Pelaksanaan Rakor Peningkatan Kemampuan Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir	4 kali					4 kali					100%				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Miskin, KAT Dan PMKS Lainnya															
4.2	Jumlah rakor/sosialisasi peningkatan (capacity building) petugas sosial		2 kali					2 kali					100%			
4.3	Jumlah petugas/pendamping sosial		100 orang					100 orang					100%			
4.4	Jumlah kegiatan keimanan dan ketaqwaan		2 kali					2 kali					100%			
4.5	Jumlah peserta kegiatan keimanan dan ketaqwaan		300 ok					300 ok					100%			
4.6	Jumlah peserta kegiatan keimanan dan ketaqwaan		2 kali					2 kali					100%			
4.7	Jumlah kegiatan fasilitasi pengurusan ijin IUMK		2 kali					2 kali					100%			
4.8	Jumlah peserta fasilitasi pengurusan ijin IUMK kewirausahaan		100 orang					100 orang					100%			
4.9	Jumlah peserta festival budaya dari kecamatan		82 orang					82 orang					100%			
4.10	Jumlah peserta festival budaya dari desa desa		128 orang					128 orang					100%			
4.11	Jumlah peserta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba		60 orang					60 orang					100%			
4.12	Jumlah fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba		2 kali					2 kali					100%			
4.13	Jumlah pendampingan kegiatan Lomba Desa		2 kali					2 kali					100%			
4.14	Jumlah Rakor Persiapan Lomba Desa		1 kali					1 kali					100%			
4.15	Jumlah rakor persiapan keikutsertaan Bantul Eskpo		1 kali					1 kali					100%			
4.16	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan Bantul		1 kali					1 kali					100%			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Ekspo															
4.17	Jumlah peserta senam masal		1.000 orang	850 orang				1.000 orang	850 orang				100%	100%		
4.18	Jumlah rakor kegiatan senam masal		2 kali					2 kali					100%			
4.19	jumlah pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya			120 orang					120 orang					100%		
4.20	kelancaran kegiatan penanggulangan kemiskinan			100 persen					100 persen					100%		
4.21	jumlah kaum rois dan karang taruna			100 orang					100 orang					100%		
4.22	kelancaran kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan			100 persen					100 persen					100%		
4.23	Jumlah pelatihan kewirausahaan			2 kali					2 kali					100%		
4.24	kelancaran kegiatan pelatihan kewirausahaan			100 persen					100 persen					100%		
4.25	Jumlah rakor persiapan festival budaya			2 kali					2 kali					100%		
4.26	umlah mengikuti festival budaya			1 kali					1 kali					100%		
4.27	kelancaran festival budaya			100 persen					100 persen					100%		
4.28	Jumlah rapat persiapan lomba desa			3 kali					3 kali					100%		
4.29	kelancaran kegiatan lomba desa			100 persen					100 persen					100%		
4.30	Jumlah kegiatan bantul ekspo			1 kali					1 kali					1 kali		
4.31	kelancaran keikutsertaan bantul ekspo			100 persen					100 persen					100%		
4.32	meningkatnya kesehatan masyarakat			100 persen					100 persen					100%		
4.33	Laporan pembinaan bidang sosial				2 laporan					2 laporan					100%	
4.34	Laporan pembinaan bidang kesehatan				2 laporan					2 laporan					100%	
4.35	Laporan pembinaan				2					2					100%	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	bidang keagamaan				laporan					laporan						
4.36	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan				2 laporan					2 laporan					100%	
4.37	Laporan pembinaan bidang kebudayaan				2 laporan					2 laporan					100%	
4.38	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan				96 persen					96 persen					100%	
4.39	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan				2 laporan					2 laporan					100%	
4.40	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan				96 persen					96 persen					100%	
2021																
1	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100					100					100%
1.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan					100					100					100%
1.1.1	Dokumen Monografi Kecamatan					2 Dokumen					2 Dokumen					100%
1.1.2	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa					4 Dokumen					4 Dokumen					100%
1.1.3	Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa					12 Dokumen					12 Dokumen					100%
1.1.4	Laporan Rakorpimcam/ Muspika					3 Dokumen					3 Dokumen					100%
1.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon					100					100					100
1.2.1	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat					2 Dokumen					2 Dokumen					100%
1.2.2	Layanan Yang Diberikan					21 Jenis					21 Jenis					100%
1.2.3	Masyarakat Yang Dilayani					13000 Orang					13000 Orang					100%
2	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan					90					90					100%
2.1	Cakupan Pemerintahan Sosial Kemasyarakatan					100					100					100%
2.2	Laporan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kapanewon					2 Dokumen					2 Dokumen					100%
2.3	Laporan Pembinaan					3 Dokumen					3 Dokumen					100%

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Bidang Dikpora															
2.4	Laporan Pendampingan Upaya Pengentasan Kemiskinan					3 Dokumen					3 Dokumen					100%
3	Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon					90					90					100%
3.1	Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum					100					100					100%
3.1.1	Laporan Monitoring Lokasi Rawan Bencana					4 Dokumen					4 Dokumen					100%
3.1.2	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan					4 Dokumen					4 Dokumen					100%
3.1.3	Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat Dan Linmas					4 Dokumen					4 Dokumen					100%
4	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100					100					100%
4.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum					100					100					100%
4.1.1	Laporan Rapat Koordinasi Muspika					3 Dokumen					3 Dokumen					100%
4.1.2	Upacara 17an, Hari Besar Dan Hari Besar					12 Dokumen					12 Dokumen					100%

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Kapanewon Kasihan sesuai dengan tabel 2.2 setiap tahun mengalami peningkatan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran yang signifikan terjadi pada tahun 2018 yaitu sekitar 97,15%, dari tahun 2017 yaitu sekitar 91,99%, ada kenaikan sekitar 5,16%. Lalu pada tahun 2020 terjadi penurunan penyerapan anggaran yaitu sekitar 1,29%. Hal ini dikarenakan sebagai berikut :

1. Adanya penggunaan telepon kabel karena beralih ke perangkat HP, yaitu sebesar Rp. 2.282.183
2. Adanya penurunan tarif premi kesehatan dan ketenagakerjaan, yaitu sebesar Rp. 6.154.374,00.
3. Untuk Belanja Pajak Kendaraan Bermotor karena usia motor sudah tua sehingga beban pajak yang dikenakan lebih rendah dari anggaran yaitu sebesar Rp. 5.322.000,00.

Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kasihan
 Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam juta rupiah)						Realisasi (dalam juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	0,00	1731,28	1634,15	1654,59	1690,10		0,00	1566,88	1474,55	1481,96	1295,00		0.00	90.50	90.23	89.57	76.62	
2	Belanja Langsung	638,71	766,88	885,41	902,50	680,00		507,02	731,07	865,48	887,17	660,34		79.38	95.33	97.75	98.30	97.11	
3	Belanja Pegawai	14,97	11,64	90,51	15,24	18,72		12,06	11,64	90,51	15,24	18,72		80.59	100.00	100.00	100.00	100.00	
4	Belanja Barang Jasa	545,74	731,74	700,99	783,82	594,69		416,95	695,93	681,24	768,50	575,03		76.40	95.11	97.18	98.05	96.69	
5	Belanja Modal	78,00	23,50	93,92	103,44	66,59		78,00	23,50	93,73	103,43	66,59		100.00	100.00	99.80	99.99	100.00	
	Belanja:																		
6	Belanja Operasi						3258,26						1309,188						40,18
7	Belanja Modal						40,17						15,99						39,80
		1277,41	3265,04	3404,98	3459,58	3050,10	3298,43	1014,03	3029,02	3205,51	3256,30	2615,67	1325,178	84.09	96.19	96.99	97.18	94.08	41.64

*) Realisasi Anggaran pada tahun 2021 merupakan angka perkiraan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Kasihan dalam pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang adalah :

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah.
- b. Pandemi Covid 19 perlu strategi dalam hal pelayanan di Kapanewon, karena dapat menimbulkan kluster dalam penyebaran Covid19.
- c. Tantangan strategis di bidang pelayanan adalah harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, terlebih adanya beberapa media sosial yang dipergunakan masyarakat dalam menilai dan bertanya permasalahan pelayanan, dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis harus dikuasai agar dapat menjawab complain dan pertanyaan dari warga.
- d. Modernisasi perdagangan dari tradisional menjadi jual beli online.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Kasihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 139) yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah Kecamatan.
- b. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, system pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.
- c. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.
- d. Aksesibilitas di wilayah Kapanewon Kasihan sebagian besar sudah baik.
- e. Wilayah Kapanewon Kasihan merupakan wilayah dengan sektor perekonomian yaitu perdagangan dan jasa, sehingga mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat dikala dihantam gelombang pandemi covid19.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KAPANEWON KASIHAN

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2024 yaitu: “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel”.

Masalah mendesak yang harus segera diselesaikan atau paling tidak diminimalisir adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal.
- b. Pelayanan publik belum optimal karena pandemi.
- c. Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal.
- d. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal.

Adanya pandemi Covid19, pelayanan publik di Kapanewon Kasihan sangat ekstra dalam hal pengetatan protokol kesehatan. Jumlah pendudukan yang banyak dan tingkat kunjungan yang relatif sering menyebabkan kehati-hatian dalam pelayanan publik, jangan sampai menjadi kluster dalam penyebaran covid19.

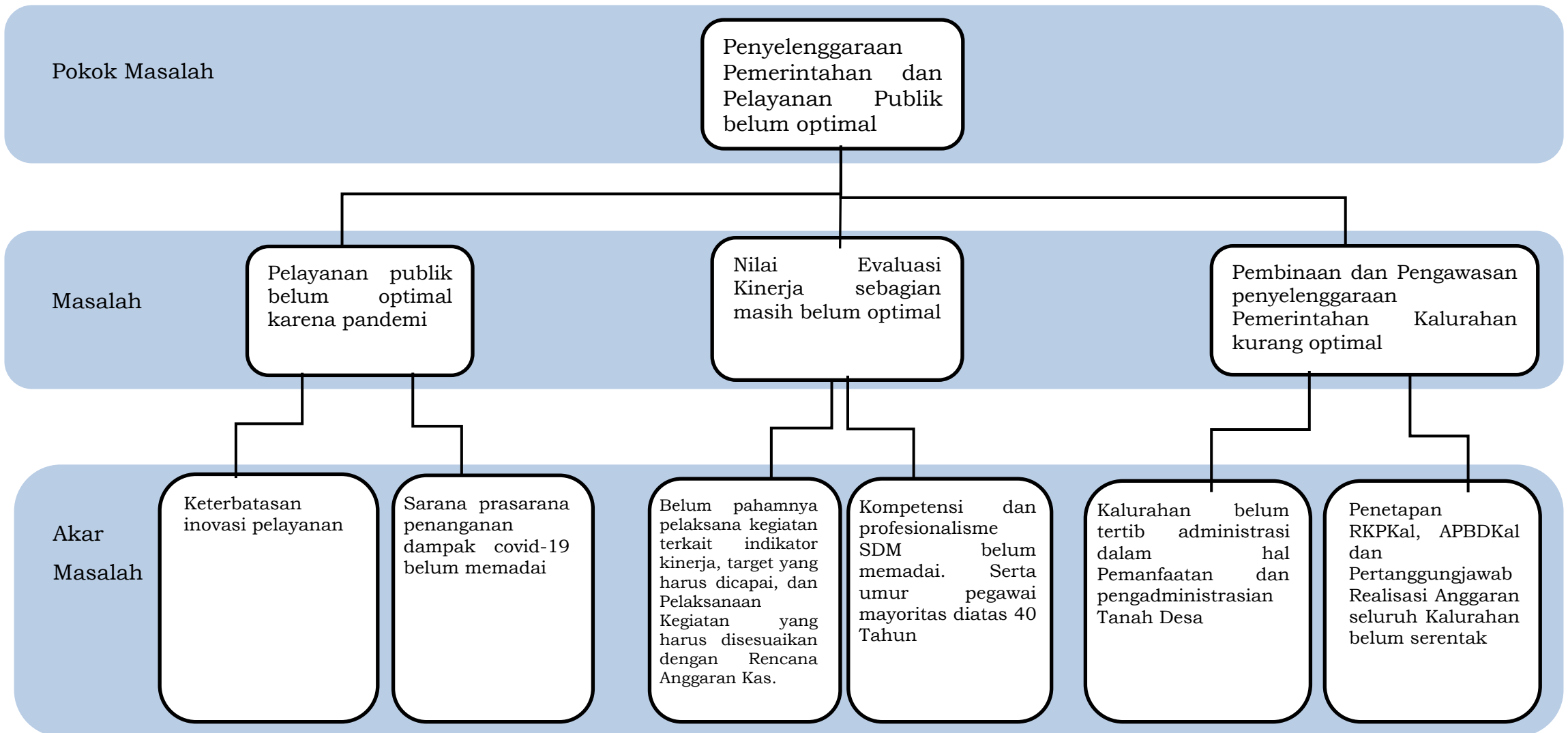
Ruang tunggu yang tergolong sempit apabila diterapkan protokol kesehatan dengan jarak 1-2m antar pemohon menyebabkan pemohon mengantri diluar ruangan yang situasi kondisinya sangat panas karena hanya memakai tempat parkir kendaraan pengunjung.

Alat Sterilisasi ruangan belum ada, hanya disediakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan. Sehingga masih perlu sekali sarana untuk menekan laju penambahan kasus positif covid19 dalam hal ini yaitu sterilisasi ruang pemohon.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan belum optimal, hal ini adanya belum tertibnya administrasi terkait pemanfaatan Tanah Desa, walaupun semua kalurahan sudah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa akan tetapi untuk penerapan pengaturan yang ada di peraturan kalurahannya belum optimal. Terkait dengan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan realisasi pertanggungjawaban masih belum seragam dalam hal kepatuhan waktunya.

Nilai Evaluasi OPD masih belum optimal, hal ini disebabkan karena adanya kekosongan jabatan sehingga ada yang rangkap jabatan sehingga kurang maksimal dalam hal penyerapan anggaran. Selain itu untuk sarana dan prasarana kurang memadai di sektor para jawatan.

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Pelayanan publik belum optimal karena pandemi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan inovasi pelayanan 2. Sarana prasarana penanganan dampak covid-19 belum memadai
	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum pahamnya pelaksana kegiatan terkait indikator kinerja, target yang harus dicapai, dan Pelaksanaan Kegiatan yang harus disesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas. 2. Kompetensi dan profesionalisme SDM belum memadai. Serta umur pegawai mayoritas diatas 40 Tahun.
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalurahan belum tertib administrasi dalam hal Pemanfaatan dan pengadministrasian Tanah Desa 2. Penetapan RKPKal, APBDKal dan Pertanggungjawab Realisasi Anggaran seluruh Kalurahan belum serentak

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Bantul yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2021-2014 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Kapanewon Kasihan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. Misi Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, yang dijabarkan dalam strategi meliputi :

- a. Penyediaan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat;
- b. Pemanfaatan Pembiayaan Pembangunan melalui Dana Non-APBD;
- c. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tugas Kapanewon dalam mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dimana Kapanewon Kasihan memiliki tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Kasihan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu

1. Penataan Organisasi, Perbaikan Ketatalaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan Kegiatan.
3. Penerapan Teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Kasihan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil
Bupati

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penataan Organisasi, Perbaikan Ketatalaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Anggaran dalam pengembangan sumber daya aparatur. 2. Adanya anggapan Diklat hanya sekedar formalitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kelembagaan yang sudah ditetapkan. 2. Kejelasan jenjang karier PNS
	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan Kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum terampilnya Personil dalam memahami dan menjalankan Aplikasi. 2. Signal Internet yang kadang kala lemah dan system yang sering down karena banyak yang menggunakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tambahan personil baru di Kapanewon Kasihan sehingga dapat menambah kinerja. 2. Komitmen dan perhatian dari pimpinan terhadap kinerja pegawai 3. Ketersediaan jaringan teknologi dan sambungan internet.
	Penerapan Teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mencukupinya ketersediaan Dana dalam pengadaan sarana dan prasarana teknologi. 2. Biaya pemeliharaan yang tinggi terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi 3. Keterbatasan SDM dalam menjalankan teknologi informasi dan komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Wilayah Kasihan tidak mengalami BLANK SPOT sehingga dapat mengakses layanan online. 2. Kemampuan masyarakat Kapanewon Kasihan dalam penerapan teknologi informasi. 3. Adanya inovasi daerah dalam menghadirkan layanan publik

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

3.3.1.1 Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
 3. Indeks Kinerja ORMAS.
- b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
- c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

3.3.1.2 Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3.3.1.3 Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
 1. Indeks Pengawasan Internal.
 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<p>1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang.</p> <p>2. Materi DIKLAT yang kurang representative.</p> <p>3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang</p>	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<p>1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah</p> <p>2. Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang</p>	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
	kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	representatif	kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Kasihan tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait langsung dengan Renstra Kapanewon Kasihan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan untuk itu diperlukan adanya upaya pembangunan disegala bidang dengan didukung oleh potensi-potensi yang ada, diantaranya adalah :

- a. Letak yang strategis di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta.
- b. Dilewati Jalur Ring Road Yogyakarta.
- c. Telah terdapat berbagai industri , baik sedang maupun kecil.

- d. Adanya prasarana perdagangan.
- e. Terdapat sentra-sentra kegiatan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi.
- f. Tersedianya sarana pendidikan yang cukup memadai.
- g. Tersedianya sarana kesehatan yang cukup memadai.
- h. Ketersediaan lahan pertanian yang memadai.
- i. Wilayah Kapanewon Kasihan tidak ada yang BLANKSPOT.
- j. Ketersediaan Jaringan Listrik yang memadai.

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kasihan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Kalurahan	Hierkhi I dalam sistem perkotaan Kabupaten. Kota Kecil (IKK Kasihan). Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY)	1. Hierarki sistem perkotaan Kabupaten dalam kesatuan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara spasial dan fungsional. 2. Pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten. 3. Pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten	1. Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan public di kawasan ibu kota kapanewon. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemeratakan pertumbuhan pembangunan	Ibu Kota Kapanewon sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).	Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Kasihan sebagai smart distric
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jaringan jalan kolektor Sekunder (Jalan Rejowinangun – Ringroad Selatan). Jaringan Jalan Lokal Sukender	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan untuk memanfaatkan potensi wilayah perbatasan dengan perkotaan	1. Pengembangan Ruas Jalan Utama Kasihan 2. Kasihan menjadi wilayah akses masuk para masyarakat dari kota Yogyakarta,	Keterbatasan SDM.	Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Sistem Jaringan Kereta Api	Jalan Kereta Api poros Utama Timur-Barat		Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman 3. Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan		
Sistem jaringan energi	Penyediaan sumber daya/atau sistem listrik yang tersedia untuk pelayanan perumahan, industri dan kegiatan lainnya	Pengembangan jaringan sistem listrik dari Gardu Listrik Sedayu dan Sewon	Ketersediaan dan kecukupan energy listrik di Kapanewon Kasihan sehingga mampu memperlancar pelayanan dan kebutuhan listrik dikalangan pelaku usaha.	Pengembangan Jaringan Listrik diwilayah Kapanewon Kasihan dengan 2 gardu listrik wilayah sedayu dan sewon	Kesemrawutan jaringan kabel listrik, kabel telpon dan kabel internet sehingga mengurangi estetika jalan.	Kebutuhan listrik dapat disuplay dari sewon dan sedayu
Sistem jaringan telekomunikasi	Pengembangan Jaringan Kabel dan Nirkabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. optimalisasi jaringan yang tersebar di seluruh kecamatan. 2. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan infrastruktur berupa pengadaan dan pengelolaan menara <i>Based Transceiver Station</i> (BTS) secara bersama-sama, yang tersebar di seluruh kecamatan 3. Pengembangan dan pengendalian 	Kebutuhan internet tercukupi sehingga memperlancar proses pelayanan dan tidak ada yang BLANKSPOT sehingga pembelajaran daring dapat berjalan rotoc.	Wilayah Kapanewon Kasihan, tempat pendidikan dan perkantoran	Kestabilan dan kekuatan signal masih belum representatif	Jaringan internet nirkabel dari Pemda Bantul sudah tersedia. Jaringan dari Provider swasta sudah tersedia

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.</p> <p>4. Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai kebutuhan informasi tersebar di seluruh Kecamatan</p>				
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Jaringan Baku dan Jaringan Irigasi	<p>Pengembangan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum</p> <p>Pengembangan Jaringan Irigasi meliputi optimalisasi layanan sistem irigasi teknis, semi teknis dan non-teknis</p>	<p>Pemenuhan kebutuhan air minum bagi daerah yang rawan kekeringan dan rawan air bersih</p> <p>Peningkatan hasil panen sehingga mempengaruhi peningkatan perekonomian petani</p>	<p>Wilayah padat penduduk di Kalurahan Ngestiharjo, Tamantirto dan Tirtonirmolo</p> <p>Lahan Pertanian yang teraluri jaringan irigasi yaitu wilayah Tamantirto, Tirtonirmolo, Ngestiharjo dan Bangunjiwo.</p>	<p>Kesadaran masyarakat terhadap kegunaan air bersih masih rendah.</p> <p>Ketersediaan dana dalam pembersihan dan perawatan saluran irigasi</p>	<p>Jaringan air bersih sudah masuk dan tersedia</p> <p>Adanya kelompok tani dan pengurus P3AI</p> <p>Masuknya program pembangunan Irigasi di wilayah Kapanewon Kasihan</p>
Sistem Jaringan Prasarana wilayah lainnya	Sistem Drainase Perkotaan	1. Jaringan pembuangan air hujan dan peresapan air hujan yang	Pembuangan Air Hujan untuk mengurangi genangan.	Kelengkapan Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.	Keterbatasan Dana PIK	Partisipasi/Kesadaran masyarakat dalam memelihara saluran drainase

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>dibedakan menjadi saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, sumur peresapan, dan kolam retensi/embung/pengendalian banjir.</p> <p>2. Peningkatan pelayanan jaringan pembuangan air hujan pada jalan dan kawasan yang rawan genangan serta penyambungan dalam rangka penyempurnaan sistem jaringan pembuangan air hujan</p> <p>3. Pengembangan sistem drainase yang menggunakan jaringan pembuangan air hujan</p>	Pengendali Banjir	Embung di Wilayah Ngestiharjo		
	Sistem Penyediaan air bersih	1. Sistem air bersih perpipaan yang dikelola perusahaan penyedia air minum dan jaringan yang dikelola oleh swasta dan/atau	Ketersediaan Air Bersih bagi warga masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Wilayah Padat penduduk meliputi Kalurahan Ngestiharjo, Tamantirto dan tirtonirmolo	Kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap kebutuhan air bersih	Jaringan air bersih sudah tersedia

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>masyarakat</p> <p>2. Sistem air bersih non perpipaan milik perorangan berupa sumur</p>				
	Sistem Persampahan	<p>1. pengelolaan cara setempat adalah pengelolaan di tingkat rumah tangga yang meliputi pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal maupun pengolahan sampah mandiri</p> <p>2. pengelolaan cara komunal adalah pengangkutan dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir</p> <p>3. pengolahan sampah mandiri</p>	Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan dan mendaurulang sampah sehingga terwujud Bebas Sampah	Wilayah Tirtonirmolo sudah terbangun Tempat Penampungan Sementara meliputi di Dusun Mrisi dan Pasar Desa Nirmala.	Kesadaran masyarakat masih kurang dalam pengelolaan sampah	Pegiat sampah seperti KPK yang ada di Dusun Dongkelan Kauman
	Sistem Pengelolaan Air Limbah	pengelolaan air limbah Domestik setempat dan terpusat.	Sistem Pengolahan air limbah rotocol melalui IPAL Komunal dalam mewujudkan sanitasi yang baik di Lingkungan pemukiman	Wilayah Kalurahan Bangunjiwo, Tamantirto, Tirtonirmolo dan Ngestiharjo	Penyambungan saluran dari rumah ke IPAL Komunal membutuhkan biaya yang tidak sedikit	Ketersediaan saluran IPAL Komunal yang telah terbangun

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Sistem Penerangan Jalan	penerangan jalan umum, penerangan jalan kampung, dan penerangan jalan lingkungan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Mendukung Fungsi dan estetika Jaringan Jalan sehingga mengurangi tingkat kecelakaan dan tindak kriminalitas jalanan	Seluruh jaringan jalan yang ada di Kapanewon Kasihan	Keterbatasan Dana baik dari PIK, Aspirasi Dewan dan APBDKal	Jaringan Listrik sudah tersedia sampai ke pelosok pedusunan
	Jalur Evakuasi Bencana	1. jalur evakuasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal sekunder. 2. tempat evakuasi yang terdapat di lapangan olahraga yang tersebar di seluruh Kalurahan di Kapanewon Kasihan	Mengurangi korban akibat bencana alam. Mengurangi kebingungan masyarakat apabila terjadi bencana untuk menuju lokasi evakuasi.	Tempat evakuasi berupa lapangan Kalurahan tersedia di wilayah seluruh kalurahan di Kapanewon Kasihan	Belum adanya rencana kontijensi di tingkat kapanewon dan kalurahan	Kapasitas FPRB yang tersedia di wilayah Kapanewon Kasihan. Ketersedian pendukung seperti ambulans, peralatan evakuasi dan POS DAMKAR
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kawasan Resapan Air	Menjaga ketersediaan air tanah	Kalurahan Tamantirto, Tirtonirmolo dan Bangunjiwo	Penggunaan halaman rumah warga masih didominasi dengan penutupan muka tanah dengan perkerasan.	Adanya program sumur resapan air hujan dari OPD DLH
	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sepadan Sungai	Pengamanan wliayah permukiman dengan perkuatan talud sungai	Sungai Winongo Wilayah Kalurahan Tirtonirmolo meliputi Padusunan Glondhong, Jogolanan	Masih adanya Masyarakat dalam membangun hunian di tepi sungai.	Masyarakat disekitar pinggir sungai winongo dan sungai bedog aktif

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Kidul Jogonalan Lor, Dongkelan Kauman Sungai Bedog meliputi Kalurahan Ngestiharjo, Tamantirto, tirtonirmolo dan Bangunjiwo. Sungai Widuri di Kalurahan Tirtonirmolo	Keterbatasan Anggaran dalam membangun talud pengaman tanah tepi sungai	dalam Perencanaan dimusrenbang kapanewon dan MUSKAL dalam perencanaan pembangunan Kalurahan
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya Pelestarian bangunan cagar budaya	Lestarnya Bangunan Cagar Budaya akan mempengaruhi perkembangan pariwisata minat khusus diwilayah Kapanewon Kasihan	Situs Ambarbinangun dan Masjid Patok Negara di Kalurahan Tirtonirmolo	Ketersediaan Dana yang belum mampu mendukung dalam pelestarian cagar budaya. Kewenangan yang masih terbatas untuk pengurusan cagar budaya	Kesadaran Masyarakat dalam melestarikan peninggalan sejarah
	Kawasan Rawan Bencana	Kawasan Rawan Gempa Bumi	Pembangunan Rumah hunian sesuai dengan arahan dari BNPB/BPBD dalam bentuk rumah tahan gempa	Seluruh kalurahan di wilayah Kapanewon Kasihan	Belum adanya rencana Kontijensi Wilayah Kapanewon Kasihan	Kapasitas FPRB tersebar di seluruh kalurahan se-Kapanewon Kasihan
		Kawasan Rawan Kekeringan	Pemetaan daerah rawan kekeringan sehingga lebih focus dalam penanggulangan kekeringan	Sebagian Kalurahan Bangunjiwo	Belum adanya rencana Kontijensi	Adanya Kapasitas FPRB di wilayah kalurahan. Adanya program PAMSIMAS
Kawasan Budidaya Kabupaten	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Pelestarian Hutan rakyat dan Wanadesa	Lestarnya hutan akan menambah ketersediaan air tanah dan udara yang segar dan bersih, serta menambah kunjungan	Sebagian Wilayah Kalurahan Bangunjiwo dan Tamantirto	Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga kelestarian hutan.	Adanya Program pemberian bibit tanaman keras dari OPD yang berwenang.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			wisata minat khusus		Terdesaknya lahan hutan rakyat karena pengaruh kebutuhan akan permukiman	
	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kawasan Pertanian Lahan Basah Kawasan Peternakan meliputi Peternakan Sapi Potong, Peternakan Babi, Peternakan Kambing	Ketersediaan pangan lokal di wilayah kapanewon kasihan karena masih adanya lahan pertanian. Pemetaan atau melokalisir peternakan sehingga tidak mencemari permukiman	Sebagian wilayah Kalurahan Ngestiharjo, sebagian wilayah Tamantirto, sebagian wilayah Tirtonirmolo dan sebagian wilayah Bangunjiwo Ngestiharjo (peternakan Babi) dan peternakan Sapi Potong, Kambing tersebar di 4 Kalurahan.	Generasi penerus untuk bertani kurang peminat sehingga hanya golongan usia lanjut yang masih bertahan. Lahan yang sempit sehingga tempat peternakan berdekatan dengan permukiman	Adanya Kelompok Tani untuk menjembatani kebutuhan petani. Adanya irigasi teknis di wilayah kapanewon kasihan Keberadaan POSKESWAN di wilayah Kapanewon Kasihan.
	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan peruntukan perikanan tangkap darat	Ketersediaan kebutuhan Ikan oleh masyarakat setempat.	Tersebar di 4 Kalurahan diwilayah Kapanewon Kasihan	Lahan yang sempit sehingga produksi ikan air tawar belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.	Aliran air disepanjang saluran air diwilayah kapanewon Kasihan tidak pernah kering.
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan	Kunjungan wisata minat khusus terutama wisata cagar budaya yang dikemas dalam study tour	Kompleks Situs Ambarbinangun di Kalurahan Tirtonirmolo Padepokan Seni Bagong Kusudiharjo di Kalurahan Tamantirto Desa Kerajinan Kasongan-Jipangan-	Pandemi Covid19 mengurangi kunjungan wisata	Dukungan dari DANAIS dan pelatihan bagi POKDARWIS

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Gendeng-Lemahdadi (KAJIGELEM)		
	Kawasan Peruntukan Permukiman	Permukiman Perkotaan	Pengembangan Bantul Kota Mandiri di Wilayah Kapanewon Kasihan	Kalurahan Bangunjiwo	Ketersediaan dana dalam mewujudkan Bantul Kota Mandiri	Ketersediaan Lahan di wilayah Kalurahan Bangunjiwo
	Kawasan Peruntukan Fasilitas Pelayanan Umum	<p>Fasilitas Perdagangan dan jasa</p> <p>Fasilitas Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan SMA</p> <p>Fasilitas Pendidikan pada pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu</p> <p>Fasilitas Kesehatan</p>	<p>Kasih sebagai Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) dengan mata pencaharian utama masyarakat yaitu Perdagangan dan Jasa.</p> <p>Kebutuhan sarana pendidikan yang terjangkau</p> <p>Kebutuhan tempat kos, layanan Fotocopy dan Toko penyediaan kebutuhan pendidikan</p> <p>Ketersediaan Fasilitas Kesehatan mulai Klinik/Poliklinik, Rumah Sakit, Dokter/Bidan Praktek, PUSKESMAS</p>	<p>4 Kalurahan di Kapanewon Kasihan</p> <p>Tersebar di 4 Kalurahan</p> <p>Kalurahan Tamantirto</p> <p>Tersebar di wilayah Kapanewon Kasihan</p>	<p>Pandemi Covid19 menyebabkan perkembangan perdagangan menjadi sulit.</p> <p>Keterbatasan Dana untuk pengembangan sarana dan prasaran pendidikan dalam menghadapi PTM dimasa Pandemi Covid19</p> <p>Pandemi Covid19 menyebabkan terhentinya jalannya perkuliahan secara Luring</p> <p>Keterbatasan Lahan untuk perluasan Fasilitas Kesehatan.</p>	<p>Ketersediaan bangunan pasar dan BUMKal di wilayah Kapanewon Kasihan</p> <p>Dukungan seluruh Stakeholder dalam mendukung PTM dimasa Pandemi Covid19.</p> <p>Kredibilitas dan Akreditasi Pendidikan Tinggi</p> <p>Dukungan masyarakat terkait keberadaan dan pengembangan Fasilitas Kesehatan.</p>

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>Fasilitas Peribadatan</p> <p>Fasilitas Rekreasi</p> <p>Pengembangan Fasilitas Perkantoran</p> <p>Pengembangan taman pekuburan/pemakaman</p>	<p>Pendirian Tempat Ibadah untuk memfasilitasi kebutuhan umat beragama dalam melaksanakan ibadah.</p> <p>Pengembangan tempat wisata untuk tujuan rekreasi.</p> <p>Kelancaran administrasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak</p> <p>Penyediaan kebutuhan akan tempat untuk memakamkan jenazah</p>	<p>Tersebar di wilayah Kapanewon Kasihan</p> <p>Kasongan Tirtonirmolo Embung Ngestiharjo Sendang Kasihan Tamantirto</p> <p>Tersebar di wilayah Kapanewon Kasihan</p> <p>Tersebar di wilayah Kapanewon Kasihan</p>	<p>Keterbatasan sarana dan prasarana tempat ibadah dan petugas dalam penertiban pelaksanaan ibadah dalam pandemic covid19</p> <p>Kurangnya Kesiapan masyarakat dalam mengelola fasilitas tempat rekreasi.</p> <p>Kurangnya alat sterilisasi ruangan di bangunan perkantoran</p> <p>Kurangnya Ketersediaan Lahan yang digunakan untuk tempat makam</p>	<p>Sikap toleran antar umat beragama di wilayah Kapanewon Kasihan</p> <p>Adanya Pendampingan dari OPD terkait.</p> <p>Ketersediaan dana untuk mendukung program 5M di wilayah perkantoran kapanewon kasihan</p> <p>Kebutuhan yang tinggi tempat makam karena Pandemi Covid19</p>

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Kasihan, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu Strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Mengacu hasil analisa dari

1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah .
3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kapanewon Kasihan dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah.

Analisis isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, Kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja Kapanewon Kasihan sebagai Organisasi Perangkat Daerah.

Berikut ini beberapa isu- isu strategis mengacu hasil dari analisa Kinerja Pelayanan, Keuangan Perangkat daerah, tantangan dan peluang, permasalahan

berdasarkan tugas pokok fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu sebagai berikut :

1. Pengisian Jabatan yang kosong di Lingkungan Kerja Kapanewon Kasihan.
2. Kerjasama yang baik antara FORKOMPINKAP, Kalurahan, ORMAS, dan seluruh Stakeholder.
3. Bentuk-bentuk Tindakan Kriminalitas yang muncul di wilayah Kapanewon Kasihan.
4. Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan.
5. Ketersediaan Sarana Prasarana dan ruangan yang belum memadai, terutama ruang pelayanan yang harus memenuhi standar protokol kesehatan covid19.
6. Penumbuhan perekonomian sebagai akibat protocol covid19 sesuai dengan Penataan BWP Kasihan yaitu Mewujudkan BWP Kasihan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
7. Tumbuhnya pusat hiburan dan kebugaran seperti Café, Panti Pijat, SPA dan Salon.
8. Aksesibilitas di Wilayah Kapanewon Kasihan.
9. Lengkapnya lembaga pendidikan dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi.
10. Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal.
11. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal.
12. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menekan angka positif covid19 dan penanganan kematian akibat covid-19.
13. Pengelolaan Sampah dan Limbah Keluarga.
14. Peningkatan Sarana Prasarana PAUD dan TK, Ruang Bermain Anak dan Taman Literasi Anak.

Untuk penentuan prioritas masalah, menggunakan metode Multiple Criteria Utility Assessment (MCUA) yaitu salah satu metode penentuan prioritas dengan teknik scoring. Tujuan ini untuk mengetahui prioritas isu-isu strategis yang harus mendapatkan perhatian.

Tabel 3.6
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

NO	KRITERIA	BOBOT
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah	20%
2.	Merupakan Tugas dan Tanggung jawab Organisasi	10%
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap wilayah Kapanewon dan masyarakat	10%
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	25%
5.	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15%
6.	Tingkat Urgensitas Isu untuk segera ditindaklanjuti	20%
TOTAL		100%

Tabel 3.7 Skala Penilaian Usulan Program/Kegiatan

NO	NILAI	KETERANGAN
1.	5	Terkait Sangat Tinggi
2.	4	Terkait Tinggi
3.	3	Cukup terkait
4.	2	Kurang Terkait
5.	1	Terkait Lemah

Tabel 3.8
 Nilai Skala Kriteria

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA x BOBOT KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengisian Jabatan yang kosong di Lingkungan Kerja Kapanewon Kasihan	100	50	20	50	60	100	380
2	Kerjasama yang baik antara FORKOMPINKAP, Kalurahan, ORMAS, dan seluruh Stakeholder	100	40	50	100	75	60	425
3	Bentuk-bentuk Tindakan Kriminalitas yang muncul di wilayah Kapanewon Kasihan	60	10	50	125	45	100	390
4	Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan	100	50	20	100	75	100	625
5.	Ketersediaan Sarana Prasarana dan ruangan yang belum memadai, terutama ruang pelayanan yang harus memenuhi standar protocol kesehatan covid19	100	50	50	125	75	100	500
6.	Penumbuhan perekonomian sebagai akibat protocol covid19 sesuai dengan Penataan BWP	100	50	50	125	45	60	430

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA x BOBOT KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kasihani yaitu Mewujudkan BWP Kasihani sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif							
7	Tumbuhnya pusat hiburan dan kebugaran seperti Café, Panti Pijat, SPA dan Salon	40	10	50	125	30	20	275
8	Aksesibilitas di Wilayah Kapanewon Kasihani	100	50	50	125	45	100	470
9	Lengkapnya lembaga pendidikan dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi	60	10	50	125	30	40	315
10	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal	100	50	30	125	30	100	435
11	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal.	100	50	50	125	30	100	455
12	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menekan angka positif covid19 dan penanganan kematian akibat covid19.	100	50	50	125	30	100	455
13	Pengelolaan Sampah dan Limbah Keluarga.	60	40	50	125	30	100	405

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA x BOBOT KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Peningkatan Sarana Prasarana PAUD dan TK, Ruang Bermain Anak dan Taman Literasi Anak.	60	20	40	125	30	60	335

Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu-isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengisian Jabatan yang kosong di Lingkungan Kerja Kapanewon Kasihan	380	0.064
2	Kerjasama yang baik antara FORKOMPINKAP, Kalurahan, ORMAS, dan seluruh Stakeholder	425	0.072
3	Bentuk-bentuk Tindakan Kriminalitas yang muncul di wilayah Kapanewon Kasihan	390	0.066
4	Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan	625	0.106
5.	Ketersediaan Sarana Prasarana dan ruangan yang belum memadai, terutama ruang pelayanan rotoc yang harus memenuhi standar rotocol kesehatan covid19	500	0.085
6.	Penumbuhan perekonomian sebagai akibat rotocol covid19 sesuai dengan Penataan BWP Kasihan yaitu Mewujudkan BWP Kasihan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif	430	0.073
7	Tumbuhnya pusat hiburan dan kebugaran seperti Café, Panti Pijat, SPA dan Salon	275	0.047
8	Aksesibilitas di Wilayah Kapanewon Kasihan	470	0.080
9	Lengkapnya lembaga pendidikan dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi	315	0.053
10	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal	435	0.074
11	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan	455	0.077

NO	ISU STRATEGIS	TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR
	Pemerintahan Kelurahan kurang optimal.		
12	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menekan angka positif covid19 dan penanganan kematian akibat covid19.	455	0.077
13	Pengelolaan Sampah dan Limbah Keluarga.	405	0.069
14	Peningkatan Sarana Prasarana PAUD dan TK, Ruang Bermain Anak dan Taman Literasi Anak.	335	0.057
JUMLAH		5.895	1.000

Dari roto 4.1. dapat disimpulkan bahwa Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan mendapat rata-rata skor yang paling tinggi, sehingga perlu mendapatkan skala prioritas untuk segera ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan.
2. Ketersediaan Sarana Prasarana dan ruangan yang belum memadai, terutama ruang pelayanan rotoc yang harus memenuhi standar rotocol kesehatan covid19.
3. Aksesibilitas di Wilayah Kapanewon Kasihan.

Tumbuhnya pusat hiburan dan kebugaran seperti Café, Panti Pijat, SPA dan Salon mendapat rata-rata skor yang paling rendah, walaupun mendapat nilai yang rendah lalu tidak menjadi hal yang ditinggalkan atau tidak diperhatikan, akan tetapi tetap menjadi perhatian walau bukan menjadi yang prioritas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Kasihan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Kasihan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi Kapanewon Kasihan ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (*Strength-Weakness*) dan faktor eksternal (*Opportunity-Threat*) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Kasihan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung dan sarana prasarana tersedia dalam kondisi yang baik. 2. Jumlah personil Kapanewon Kasihan. 3. Koordinasi antar pimpinan dan staf berjalan dengan baik. 4. Ketersediaan Anggaran. 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kualitas SDM bagi penyelenggara Negara. 2. Sarana dan prasarana yang ada tergolong keluaran lama terutama komputer dan laptop. 3. Kekosongan Jabatan. 4. Umur personil Kapanewon Kasihan mayoritas diatas 40 Tahun. 5. Ruang Pelayanan kurang representatif dalam era pandemi Covid19
<p style="text-align: center;">PELUANG (OPPORTUNITIES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup tentang tupoksi kapanewon. 2. Adanya Program beasiswa kuliah bagi PNS. 3. Adanya DIKLAT yang dilaksanakan oleh OPD Lain. 4. Ketersediaan pihak luar dalam pengadaan sarana dan prasaran kantor 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih. 2. Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok fungsi yang sudah diatur yang didukung sarana dan prasarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pengisian kekosongan jabatan dan peremajaan personil. 2. Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (computer/laptop)
<p style="text-align: center;">ANCAMAN (THREATS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pandemi Covid19. 2. Penggunaan Media sosial dalam kritisasi kinerja ASN. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan strerilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan. 2. Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA. 3. Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial. 2. Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representative.

Tabel 5.2.

Analisis Pengelompokan Strategi

STRATEGI BERDASARKAN ANALISIS SWOT	PENGELOMPOKAN STRATEGI		
1. Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih. 2. Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok fungsi yang sudah diatur yang didukung sarana dan prasarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil.	S1	1	Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih.
3. Mengusulkan pengisian kekosongan jabatan dan peremajaan personil. 4. Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (computer/laptop) 5. Melakukan strerilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan.		8	Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial.
6. Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA. 7. Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif.	S2	2	Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok fungsi yang sudah diatur yang didukung sarana dan prasarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil.
8. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial. 9. Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representative.		3	Mengusulkan pengisian kekosongan jabatan dan peremajaan personil
	S3	6	Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA.
		7	Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif.
	S4	4	Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (computer/laptop)
		5	Melakukan strerilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan.
		9	Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representative.

Berdasarkan Tabel 5.2, pengelompokkan 9 (sembilan) strategi menjadi 4 Strategi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya kelima strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) S.1. Meningkatkan Kapasitas Personil Kapanewon Kasihan.
- 2) S.2. Meningkatkan Kinerja dan meremajakan usia personil Kapanewon Kasihan.
- 3) S.3. Melaksanakan Pelayanan Prima.
- 4) S.4. Memperbaiki dan merehabilitasi sarana dan prasarana kantor.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Kapanewon Kasihan

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”			
MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Meningkatkan Kapasitas Personil Kapanewon Kasihan.	1. Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia yang capable dan compatible.
		2. Meningkatkan Kinerja dan meremajakan usia personil Kapanewon Kasihan.	2. Tercapainya target capaian kinerja OPD Kapanewon Kasihan.
		3. Melaksanakan Pelayanan Prima.	3. Tumbuhnya Kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja Kapanewon Kasihan.
		4. Memperbaiki dan merehabilitasi sarana dan prasarana kantor	4. Terwujudnya sarana, prasarana dan bangunan kantor yang representative

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Kasihan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata SKM perangkat daerah	88,03 Angka	88,1 Angka		88,4 Angka		88,8 Angka		89,1 Angka		89,5 Angka		89,5 Angka			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			IKM Kapanewon	Nilai SKM perangkat daerah	90 Angka	90 Angka		90 Angka		91 Angka		91 Angka		92 Angka		92 Angka			
		04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWANGAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan	n/a	100 persen	Persen 45.300.000	100 persen	Persen 116.040.000	100 persen	Persen 116.040.000	100 persen	Persen 116.040.000	100 persen	Rp 116.040.000	100 persen	Rp 509.460.000	Jawatan Praja	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%															
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	n/a	0 Persen		82 Persen		83 Persen		84 Persen		85 Persen		85 Persen		Sub Bagian Umum Sekretariat	
		04.1.0 4.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%	n/a	100 persen	Persen45.300.000	100 persen	Persen66.040.000	100 persen	Persen66.040.000	100 persen	Persen66.040.000	100 persen	Rp66.040.000	100 persen	Rp309.460.000	Jawatan Praja	KAP KASIHAN
		04.1.04. 2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon			4 dokumen	Persen45.300.000	4 dokumen	Persen66.040.000	4 dokumen	Persen66.040.000	4 dokumen	Persen66.040.000	4 dokumen	Rp66.040.000	20 dokumen	Rp309.460.000	Jawatan Praja	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kebudayaan	Dokumen Perencanaan urusan Keistimewaan di Kapanewon			3 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		30 dokumen			
		04.01.04.2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	0 Persen	Persen 0	100 persen	Persen50.000.000	100 persen	Persen50.000.000	100 persen	Persen50.000.000	100 persen	Rp50.000.000	100 persen	Rp200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	KAP KASIHAN
		4.01.04.2.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan		n/a	0	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 Dokumen		Sub Bagian Umum Sekretariat	KAP KASIHAN
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	0	Persen0	20 orang	Persen50.000.000		20 orang	Persen50.000.000		20 orang		20 orang		Rp50.000.000	80 orang
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA*	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	83 Persen	85 angka	Persen 3.164.250.750	86 angka	Persen3.304.139.209	87 angka	Persen3.473.471.297	88 angka	Persen3.576.871.297	89 angka	Rp3.927.038.482	89 angka	Rp17.445.771.035	Sekretariat	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	95 Persen	95 Persen	Persen9.000.000	95 Persen	Persen10.500.000	95 Persen	Persen12.000.000	95 Persen	Persen13.500.000	95 Persen	Rp15.000.000	95 Persen	Rp60.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		1 dok	1 dok	Persen3.000.000	1 dok	Persen3.500.000	1 dok	Persen4.000.000	1 dok	Persen4.500.000	1 dok	Rp5.000.000	5 dok	Rp20.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok hasil Evaluasi		1 dok	1 dok	Persen6.000.000	1 dok	Persen3.000.000	1 dok	Persen3.500.000	1 dok	Persen4.000.000	1 dok	Rp4.500.000	5 dok	Rp21.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Dok Keuangan		1 dok	1 dok	Persen6.000.000	1 dok	Persen4.000.000	1 dok	Persen4.500.000	1 dok	Persen5.000.000	1 dok	Rp5.500.000	5 dok	Rp19.000.000	Sekretariat	
		07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadmi nistrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85 (angka)	100 Persen	Persen2.585.557.950	100 Persen	Persen2.594.272.770	100 Persen	Persen2.618.869.770	100 Persen	Persen2.639.210.770	100 Persen	Rp2.662.734.770	100 Persen	Rp13.100.646.030	Sekretariat	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Persen1.676.020.180	14 kali	Persen1.684.735.000	14 kali	1.709.332.000	14 kali	Persen1.729.673.000	14 kali	Rp1.753.197.000	70 kali	Rp8.552.957.180	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	Persen863.817.770	12 kali	Persen863.817.770	12 kali	Persen863.817.770	12 kali	Persen863.817.770	12 kali	Rp863.817.770	60 kali	Rp4.319.088.850		
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan		12 OB	12 OB	Persen45.720.000	12 OB	Persen45.720.000	12 OB	Persen45.720.000	12 OB	Persen45.720.000	12 OB	Rp45.720.000	60 OB	Rp228.600.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	95 Persen	95 Persen	Persen126.668.068	95 Persen	Persen182.302.000	95 Persen	Persen183.602.000	95 Persen	Persen210.102.000	95 Persen	Rp202.102.000	95 Persen	Rp904.776.068	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		10 jenis	10 jenis	Persen12.000.000	10 jenis	Persen10.000.000	10 jenis	Persen10.500.000	10 jenis	Persen11.000.000	10 jenis	Rp11.500.000	10 jenis	Rp55.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.0101.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		25 jenis	25 jenis	Persen16.281.418	25 jenis	Persen12.000.000	25 jenis	Persen12.000.000	25 jenis	Persen12.000.000	25 jenis	Rp12.500.000	25 jenis	Rp64.781.418	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		15 jenis	15 jenis	Persen15.000.000	15 jenis	Persen13.500.000	15 jenis	Persen14.000.000	15 jenis	Persen29.500.000	15 jenis	Rp20.000.000	15 jenis	Rp92.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.0101.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		24 banner	28 banner	Persen20.678.000	24 banner	Persen7.200.000	24 banner	Persen7.200.000	24 banner	Persen7.200.000	24 banner	Rp7.200.000	128 banner	Rp49.478.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Penggandaan		24.000 lbr	42.619 lbr		25.000 lbr	Persen7.200.000	25000 lbr	Persen7.500.000	25000 lbr	Persen7.500.000	25000 lbr	Rp7.500.000	142.619 lbr	Rp29.700.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.0101.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		4 jenis	4 jenis	Persen4.800.000	4 jenis	Persen4.800.000	4 jenis	Persen4.800.000	4 jenis	Persen4.800.000	4 jenis	Rp4.800.000	4 jenis	Rp24.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.0101.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		36 dok	36 dok		36 dok		36 dok		36 dok		36 dok		180 dok	Rp577.246.650	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Perjalanan dinas dalam daerah		180 OP	180 OP		180 OP	Persen125.102.000	180 OP	Persen125.102.000	180 OP	Persen135.102.000	180 OP	Rp135.102.000	900 OP	Rp0	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Perjalanan dinas luar daerah		6 OP	6 OP		6 OP		6 OP		6 OP		6 OP		30 OP	Rp0	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.0101.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		2 dok	2 dok	Persen1.070.000	2 dok	Persen2.500.000	2 dok	Persen2.500.000	2 dok	Persen3.000.000	2 dok	Rp3.500.000	10 dok	Rp12.570.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	95 Persen	95 Persen	Persen54.651.000	95 Persen	Persen95.965.039	95 Persen	Persen236.150.127	95 Persen	Persen341.209.127	95 Persen	Rp674.352.312	95 Persen	Rp1.402.327.605	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.0101.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel		1 unit	3 unit	Persen15.221.000	3 Unit	Persen42.514.020	4 Unit	Persen114.075.064	4 unit	Persen166.229.564	2 unit	Rp331.676.156	10 unit	Rp669.715.803	Sekretariat	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		3 jenis	5 jenis	Persen39.430.000	3 Jenis	Persen53.451.020	4 Jenis	Persen122.075.064	4 jenis	Persen174.979.564	4 jenis	Rp342.676.156	4 jenis	Rp732.611.803	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	95 Persen	95 Persen	Persen180.925.600	95 Persen	Persen195.525.600	95 Persen	Persen197.275.600	95 Persen	Persen197.275.600	95 Persen	Rp197.275.600	95 Persen	Rp968.278.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		2.100 lbr	400 lbr	Persen4.000.000	2.100 lbr	Persen10.000.000	2.200 lbr	Persen10.000.000	2.200 lbr	Persen10.000.000	2.300 lbr	Rp10.000.000	9.700 lbr	Rp44.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.2.08.027.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik		12 bln	12 bln	Persen45.000.000	12 bln	Persen50.000.000	12 bln	Persen50.000.000	12 bln	Persen50.000.000	12 bln	Rp50.000.000	60 bln	Rp245.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Pembayaran Rekening Telepon		12 bln	12 bln	Persen45.000.000	12 bln	Persen3.600.000	12 bln	Persen3.600.000	12 bln	Persen3.600.000	12 bln	Rp3.600.000	60 bln	Rp14.400.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10 jenis	3 jenis	Persen12.750.000	10 jenis	Persen12.750.000	10 jenis	Persen14.500.000	10 jenis	Persen14.500.000	10 jenis	Rp14.500.000	10 jenis	Rp69.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		2 dok	2 dok	Persen19.175.600	2 dok	Persen119.175.600	2 dok	Persen119.175.600	2 dok	Persen119.175.600	2 dok	Rp119.175.600	10 dok	Rp595.878.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Laporan kebersihan lingkungan		2 dok	1 dok	Persen19.175.600	2 dok	Persen119.175.600	2 dok	Persen119.175.600	2 dok	Persen119.175.600	2 dok	Rp119.175.600	9 dok	Rp0	Sekretariat	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				kantor																
				Laporan kegiatan pelayanan umum kap		2 dok	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		10 dok	Rp0	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Iuran BPJS		12 bln	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln	Rp0	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Iuran JKK		12 bln	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln	Rp0	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Iuran JKM		12 bln	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln	Rp0	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	95 Persen	95 Persen	Persen207.448.132	95 Persen	Persen225.573.800	95 Persen	Persen225.573.800	95 Persen	Persen175.573.800	95 Persen	Rp175.573.800	95 Persen	Rp1.009.743.332	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		5 unit		Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		6 unit	6 unit	Persen88.070.000	6 unit	Persen66.250.000	6 unit	Persen66.250.000	6 unit	Persen66.250.000	6 unit	Rp66.250.000	30 unit	Rp353.070.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		10 unit	4 jenis	Persen24.345.000	10 unit	Persen26.250.000	10 unit	Persen26.250.000	10 unit	Persen26.250.000	10 unit	Rp26.250.000	44 unit	Rp129.345.000	Sekretariat	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				perkantoran																
		07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		3 unit	3 unit	Persen5.033.132	3 unit	Persen133.073.800	3 unit	Persen133.073.800	3 unit	Persen83.073.800	3 unit	Rp83.073.800	15 unit	Rp527.328.332	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	90 Persen	100 Persen	Persen60.147.000	100 Persen	Persen61.681.100	100 Persen	Persen84.569.320	100 Persen	Persen144.569.320	100 Persen	Rp214.820.257	100 Persen	Rp565.786.997	Jawatan Praja	KAP KASIHAN
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	90 Persen	Persen40.098.000	90 Persen	Persen41.120.750	90 Persen	Persen56.379.550	90 Persen	Persen96.379.620	90 Persen	Rp143.213.507	90 Persen	Rp377.191.427	Jawatan Praja	KAP KASIHAN
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Laporan koordinasi forkompinkap		4 dok	4 dok	Persen20.049.000	4 dok	Persen20.560.400	4 dok	Persen28.189.780	4 dok	Persen48.189.920	4 dok	Rp71.606.757	20 dok	Rp188.595.857	Jawatan Praja	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
		07.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kap kepada kalurahan		4 dok	4 dok	Persen20.049.000	4 dok	Persen20.560.350	4 dok	Persen28.189.770	4 dok	Persen48.189.700	4 dok	Rp71.606.750	20 dok	Rp188.595.570	Jawatan Praja	KAP KASIHAN
		07.01.02.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 persen	90 persen	Persen20.049.000	90 persen	Persen20.560.350	90 persen	Persen28.189.770	90 persen	Persen48.189.700	90 persen	Rp71.606.750	90 persen	Rp188.595.570	Jawatan Pelayanan Umum	KAP KASIHAN
		07.01.02.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 dok	2 dok	Persen20.049.000	2 dok	Persen20.560.350	2 dok	Persen28.189.770	2 dok	Persen48.189.700	2 dok	Rp71.606.750	10 dok	Rp188.595.570	Jawatan Pelayanan Umum	KAP KASIHAN
				Masyarakat yang dilayani		10.000 org	10.000 org		10250 org		10250 org		10500 org		10500 org		51.500 org		KAP KASIHAN	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)) /2	90 Persen	90 Persen	Persen98.440.367	90 Persen	Persen11.462.477	91 Persen	Persen13.4.306.972	92 Persen	Persen19.4.306.972	93 Persen	Rp274.966.087	93 Persen	Rp813.482.875	Jawatan Kemakmuran	KAP KASIHAN
		07.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat di kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	90 Persen	Persen65.626.917	90 Persen	Persen74.308.327	90 Persen	Persen89.538.072	90 Persen	Persen12.9.538.072	90 Persen	Rp183.310.737	90 Persen	Rp542.322.125	Jawatan Kemakmuran	KAP KASIHAN
		07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		1 dok	1 dok	Persen3.2.813.467	1 dok	Persen37.154.177	1 dok	Persen44.769.172	1 dok	Persen64.769.172	1 dok	Rp91.655.387	5 dok	Rp271.161.375	Jawatan Kemakmuran	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pembangunan di Desa																	
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		2 dok	2 dok	Persen32.813.450	2 dok	Persen37.154.150	2 dok	Persen44.768.900	2 dok	Persen64.768.900	2 dok	Rp91.655.350	10 dok	Rp271.160.750	Jawatan Sosial	KAP KASIHAN
		07.01.03.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	82 Persen	Persen32.813.450	82 Persen	Persen37.154.150	82 Persen	Persen44.768.900	82 Persen	Persen64.768.900	82 Persen	Rp91.655.350	82 Persen	Rp271.160.750	Jawatan Kemakmuran	KAP KASIHAN
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		2 dok	2 dok	Persen32.813.450	2 dok	Persen37.154.150	2 dok	Persen44.768.900	2 dok	Persen64.768.900	2 dok	Rp91.655.350	10 dok	Rp271.160.750	Jawatan Kemakmuran	KAP KASIHAN
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)* 100%	90 Persen	90 Persen	Persen40.146.000	90 Persen	Persen35.679.800	91 Persen	Persen73.367.760	92 Persen	Persen103.367.760	93 Persen	Rp164.198.151	93 Persen	Rp416.759.471	Jawatan Keamanan	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.04.02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	90 Persen	Persen40.146.000	90 Persen	Persen35.679.800	90 Persen	Persen73.367.760	90 Persen	Persen103.367.760	90 Persen	Rp164.198.151	90 Persen	Rp416.759.471	Jawatan Keamanan	KAP KASIHAN
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana		2 dok	2 dok	Persen40.146.000	2 dok	Persen35.679.800	2 dok	Persen73.367.760	2 dok	Persen103.367.760	2 dok	Rp164.198.151	10 dok	Rp416.759.471	Jawatan Keamanan	KAP KASIHAN
				Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon		2 dok	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		10 dok		Jawatan Keamanan	KAP KASIHAN
				laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok		Jawatan Keamanan	KAP KASIHAN
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	100 Persen	100 Persen	Persen46.777.833	100 Persen	Persen89.301.184	100 Persen	Persen117.713.421	100 Persen	Persen147.713.421	100 Persen	Rp215.064.793	100 Persen	Rp616.570.652	Jawatan Praja	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.05.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	90 Persen	Persen46.777.833	90 Persen	Persen89.301.184	90 Persen	Persen117.713.421	90 Persen	Persen147.713.421	90 Persen	Rp215.064.793	90 Persen	Rp616.570.652	Jawatan Praja	KAP KASIHAN
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		2 dok	2 dok	Persen46.777.833	2 dok	Persen89.301.184	2 dok	Persen107.713.421	2 dok	Persen147.713.421	2 dok	Rp215.064.793	10 dok	Rp606.570.652	Jawatan Keamanan	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Laporan Monev Pilkada							1 dok	Persen10.000.000					1 dok	Rp10.000.000		
Total								Rp3.455.061.950		Rp3.718.303.770		Rp3.999.468.770		Persen4.282.868.770		Persen4.912.127.770		Persen20.367.831.030		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan Kapanewon Kasihan bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kapanewon Kasihan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021 - 2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
1.	Porsentase urusan keistimewaan yang berkualitas	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Jawatan Praja
	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Dikabupaten Bantul	n/a	0%	82%	83%	84%	85%	85%	Sub Bagian Umum Sekretariat
1.2	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Jawatan Praja
1.3	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Umum Sekretariat
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Jawatan Pelayanan Umum

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	publik								
2.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	90%	90%	90 %	90 %	90 %	90 %	90%	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
3	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	90%	90%	90%	91%	92%	93%	93%	Kepala Jawatan Sosial
3.1	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Kepala Jawatan Sosial
4	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90%	90%	90%	91%	92%	93%	93%	Kepala Jawatan Keamanan
4.1	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Kepala Jawatan Keamanan
5	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Jawatan Praja
5.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Kepala Jawatan Praja

BAB VII

PENUTUP

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2021 – 2026), termaksud memperhatikan kondisi lingkungan strategis, dan situasi yang berkembang akibat pandemi covid-19 yang melanda sebagian besar wilayah di Indonesia.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kapanewon sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kapanewon tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kapanewon Kasihan. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kapanewon Kasihan.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Kapanewon Kasihan dimaksud perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparat Kapanewon Kasihan melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
3. Renstra Kapanewon Kasihan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Kasihan setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan Pengendalian dan Evaluasi Renstra Kapanewon Kasihan 2021-2026 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik.

Dengan terselenggaranya semua program dan ketercapaian tujuan dan sasaran serta terwujudnya kinerja sebagaimana tertulis dalam lampiran renstra, dalam lima tahun ke depan akan terbangun penyelenggaraan pemerintahan dengan perencanaan pembangunan yang baik dan tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kapanewon Kasihan telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Bantul, September 2021
Panewu,

.....